Mengembangkan Sikap Toleransi di Kalangan Siswa

Restinanda Putri Mulia

IIK STRADA Indonesia

zifarazahra10@gmail.com

Abstrak

Toleransi bagian etika sosial yang melandasi sikap dan perbuatan yang tenang di atas kebaikan dan kebenaran dalam interaksi sosial bersama. Etika sosial menghidupkan sikap dan perilaku toleran, menghidupi serta mengagungkan kebaikan dan kebenaran di masyarakat. Pengendalian sebagai pemikiran dan tindakan yang dilandasi nilai etika menurut norma/kaidah sosial dan hukum yang berlaku, sehingga memanifestasikan pencapaian kepentingan bersama.

Toleransi sesungguhnya berkembang dalam kerangka adanya keberagaman dalam berbagai dimensi kehidupan, sehingga akan dapat terwujud keserasian dan keharmonisan hidup, jauh dari konflik-konflik dan ketegangan-ketegangan sosial, lebih-lebih lagi pertentangan dan permusuhan antar sesamanya dalam masyarakat. Tulisan ini bertujuan mendeskripsikan pentingnya pengembangan sikap toleransi dan kebersamaan melalui rekayasa paedagogis guru dalam latar masyarakat majemuk. Kamajemukan ini juga terjadi dalam seting atau lingkungan sekolah, di mana di dalamnya siswa saling berinteraksi, saling belajar menghargai perbedaan serta saling menerima sesuatu karakteristik tertentu yang mungkin pada lingkungannya tidak pernah dia temui.

1. Latar Belakang

Filosof Isaiah Berlin (dalam Tilaar, 1999) mengemukakan bahwa yang diperlukan dalam masyarakat bukan sekedar mencari kesamaan dan kesepakatan yang tidak mudah untuk dicapai. Justru yang paling penting di dalam masyarakat yang berbhinneka adalah adanya saling pengertian. Toleransi dan kendali mengandung nilai sosial budaya, politik dan hukum yang mengikat hubungan-hubungan (interaksi) sosial di masyarakat, dan organisasi sosial. Kata toleransi mengandung makna tenggang rasa terhadap suatu keadaan, menghargai sesuatu, seseorang/sekelompok orang dengan memperhatikan eksistensi lingkungannya. Sedang kendali dimaknai sebagai fungsi kontrol terhadap hawa nafsu, keinginan diri (ego) yang berhubungan dengan tujuan tertentu untuk mewujudkan kebersamaan sebagai masyarakat, organisasi, kelompok, bangsa dan lain-lain (dikembangkan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1996).

2. Kasus/Masalah

Belum tercapainya orientasi pendidikan yang mampu mendidik ternyata membawa dampak yang cukup besar bagi kehidupan. Para lulusan pendidikan saat ini seperti kehilangan jati diri bangsa yang dulu dikenal memiliki rasa toleransi dan peduli sosial yang tinggi dalam bermasyarakat. Hal ini kemudian diperparah lagi dengan serangan kebudayaan barat yang cenderung mendorong manusia untuk hidup individualis. Banyak fenomena degradasi moralitas generasi muda saat ini yang telah membuktikan bahwa sangat mudah mencari orang-orang yang pandai dan berilmu namun sangat sedikit dari mereka yang bermoral dan mampu menggunakan ilmu sebagai mana mestinya. Mereka hanya menggunakan ilmunya untuk mengejar kepentingan pribadi semata tanpa memperdulikan orang lain.

Sikap toleransi dan peduli sosial yang merupakan jati diri bangsa Indonesia kini mengalami penurunan. Rendahnya sikap toleransi dan peduli sosial terhadap sesama ternyata juga berimbas pada berbagai sendi kehidupan. Carut-marutnya moralitas anak bangsa bisa diamati dalam kehidupan sehari-hari. Seperti pemberitaan media tentang semangat toleransi dalam kehidupan berbangsa di kalangan pelajar semakin menurun. Kapus Penelitian & Pengembangan Kebudayaan Balitbang Kemendikbud Hurip Danu Ismaji memaparkan bahwa Pada konflik sosial yang terjadi ditengah masyarakat, acapkali pelajar tak sekedar menjadi penonton tetapi sudah kerap ambil bagian secara aktif (<http://www.poskotanews.com>, 29 November 2013). Terbukti saat ini makin banyak pelajar terlibat dalam konflik sosial seperti tawuran, geng motor dan tindak kekerasan lainnya. Hidup di tengah-tengah perbedaan akan menyulitkan bagi individu yang tidak mampu menerima dan menghargai perbedaan tersebut.

3. Tinjauan Pustaka

Toleransi sesungguhnya berkembang dalam kerangka adanya keberagaman, utamanya

adalah keberagaman agama dan budaya termasuk di dalamnya kebiasaan-kebiasaan, tradisi atau adat istiadat yang menyertainya. Oleh sebab itu semakin besar keberagaman suatu bangsa atau suatu masyarakat, maka akan semakin besar pula tuntutan bagi keharusan pengembangan nilai-nilai toleransi dalam kehidupan masyarakat dan individu, sehingga akan dapat terwujud keserasian dan keharmonisan hidup, jauh dari konflik-konflik dan ketegangan-ketegangan sosial, lebih-lebih lagi pertentangan dan permusuhan antar sesamanya dalam masyarakat.

Dalam pengertian yang luas toleransi lebih terarah pada pemberian tempat yang luas bagi keberagaman dan perbedaan yang ada pada individu atau kelompok-kelompok lain. Oleh sebab itu pada awal pembahasan ini perlu penekanan kembali bahwa tidak benar bilamana toleransi dimaknai sebagai pengembirian hak-hak individu atau kelompok tertentu untuk disesuaikan dengan kondisi atau keadaan orang atau kelompok lain, atau sebaliknya mengorbankan hak-hak orang lain untuk dialihkan sesuai dengan keadaan atau kondisi kelompok tertentu.

Toleransi justru sangat menghargai dan menghormati perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing individu atau kelompok tersebut, namun di dalamnya diikat dan disatukan dalam kerangka kebersamaan untuk kepentingan yang sama. Toleransi adalah penghormatan, penerimaan dan penghargaan tentang keragaman yang kaya akan kebudayaan dunia kita, bentuk ekspresi kita dan tata cara sebagai manusia. Hal itu dipelihara oleh pengetahuan, keterbukaan, komunikasi, dan kebebasan pemikiran, katahati dan kepercayaan.

4. Pembahasan

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa sekolah adalah merupakan

suatu sistem sosial masyarakat, di mana para siswa saling belajar untuk berinteraksi, belajar memahami norma-norma sosial sekolah, belajar bekerjasama, belajar menghargai dan belajar berbagai aspek kehidupan sebagaimana layaknya dalam masyarakat. Hal ini beranjak dari suatu filosofi bahwa setiap anak dikaruniai benih untuk bergaul, bahwa setiap orang dapat saling berkomunikasi yang pada hakekatnya di dalamnya terkandung unsur saling memberi dan menerima (Tirtarahardja: 1994: 18). Proses belajar yang dilakukan terhadap berbagai aspek kehidupan dalam lingkungan sekolah ini akan menjadi bekal bagi siswa untuk lebih siap memasuki lingkungan masyarakat, terutama sekali setelah menamatkan pendidikan pada jenjang tertentu.

Khusus berkaitan dengan pengembangan nilai-nilai toleransi dan kebersamaan, lembaga pendidikan sekolah merupakan wahana yang paling tepat untuk melatih dan sekaligus menerapkan nilai-nilai ini. Hal ini utamanya disebabkan di dalam lingkungan sekolah siswa memiliki latar belakang yang sangat beragam, baik agama, suku, latar sosial ekonomi, latar pendidikan orang tua, daerah termasuk adat istiadat dan budaya. Dalam kondisi keberagaman ini sudah barang tentu akan ditemukan banyak perbedaan dalam sikap dan perilaku siswa. Sekolah dipandang sebagai wahana yang mempercepat implementasi dari pluralisme melalui berbagai bentuk kegiatan seperti workshop, latihan-latihan dan kegiatan-kegiatan dalam kelompok kecil (Joan T, 1992: 5). Perbedaan-perbedaan inilah yang harus dipahami dan bahkan saling dihormati, sehingga memungkinkan tumbuhnya solidaritas dan kebersamaan antar sesama siswa

Menghormati perbedaan tidak berarti menghilangkan identitas diri, karena menghormati perbedaan sesungguhnya adalah memberikan peluang dan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan sesuatu sesuai dengan karakteristik dirinya. Contoh untuk ini adalah bagaimana seorang siswa harus belajar menghormati ketika temannya harus melaksanakan ibadah, menghormati dan memberi kesempatan tatat kala temannya harus melaksanakan tugas-tugas tertentu, atau mungkin memberikan menghormati perbedaan-perbedaan perilaku dalam koridor yang tidak bertentangan norma-norma umum sekolah. Pendidikan adalah alat yang paling mangkus untuk menghindari nirtoleransi. Langkah pertama dalam pendidikan toleransi adalah mengajar orang-orang tentang hak-hak dan kebebasankebebasan bersama (berbagi) mereka, sehingga dapat dihormati, dan mengembangkan kemauan untuk melindungi hak-hak dan kebebasankebebasan orang lain (UNESCO APNIEVE, 2000: 156).

Tujuan pengembangan sikap toleransi di kalangan siswa di sekolah, di samping wahana latihan agar mereka lebih lanjut dapat menerapkan dan mengembangkannya secara luas dalam kehidupan masyarakat, juga didasari pemikiran bahwa lembaga pendidikan sekolah secara fundamental memang memiliki tanggung jawab secara komprehensif terhadap pembentukan intelektual dan kepribadian siswa secara utuh. Durkheim mengemukakan bahwa tiap-tiap guru harus mampu mengembangkan cita-cita moral yang ada di balik sistem aturan yang

telah dikembangkan, dan memberi peluang kepada generasi mendatang untuk memenuhi tuntutan-tuntutan validitas yang baru (Haricahyono, 1995: 203) Toleransi diperlukan antara orang seorang dan pada tingkat-tingkat keluarga dan paguyuban. Promosi toleransi dan pembentukan sikap-sikap keterbukaan, saling mendengar dan solidaritas hendaklah mengambil tempat di sekolah dan perguruan tinggi dan melalui pendidikan luar sekolah, di rumah dan di tempat kerja (UNESCO APNIEVE, 2000: 155). Pandangan yang sempit melihat peran sekolah lebih kepada pengembangan intelektual siswa, sementara aspek-aspek kepribadian utamanya menjadi tanggung jawab keluarga/orang tua. Sesungguhnya tidak demikian, karena pendidikan tidak memilah tanggung jawab pembentukan intelektual dan kepribadian, akan tetapi sudah sangat jelas bahwa kedua aspek ini berada dalam satu kesatuan yang integral yang mempunyai kedudukan sama pentingnya. Bilamana diselusuri selangkah kebelakang dalam pergulatan pendidikan melalui Perguruan Taman Siswa, Ki Hajar Dewantara telah memberikan ketegasannya, sehingga pendidikan Indonesia memang memiliki perbedaan karakteristik dengan sekolah-sekolah di negara-negara Barat.; bahwa jika dibandingkan dengan sistem “sekolah” menurut aliran Barat, maka nampak teranglah bahwa sistem Barat itu semata-mata mementingkan pencapaian ilmu dan kecerdasan keduniawian, sedangkan pendidikan di Indonesia teristimewa mementingkan pencapaian ilmu dan kecerdasan budipekerti untuk menjadi manusia yang bahagia (Dewantara, 1977: 474).

Sikap toleransi yang di dalamnya mengandung nilai-nilai penghargaan, rasa hormat terhadap hak-hak dan perbedaan serta keragaman orang lain merupakan bagian dari pendidikan umum, karena menurut R.O. Hand dan D.B. Bidna (dalam Sumaatmadja, 1990: 2) bahwa pendidikan umum juga berkenaan dengan kemampuan mengatur dan menyesuaikan sendiri dengan situasi lingkungan, memahami diri sendiri, tenang dan wajar dalam mengatasi situasi yang nyata, berkepribadian wajar. Terkait dengan pendapat tersebut maka terdapat sejumlah model pembelajaran dalam mengembangkan sikap toleransi ini, baik secara formal, informal maupun nonformal.

Dalam pemahaman yang luas pendidikan umum dapat dilaksanakan tiap kesempatan secara informal, nonformal dan formal. Untuk ini maka pendekatan yang dapat diterapkan adalah meliputi pendekatan perorangan (personal approach), pendekatan kelompok (interpersonal approach), dan pendekatan klasikal (classical approach). Metode penyajiannya juga sangat beragam dan luwes melalui cerita, ceramah, permainan simulasi, tanya jawab, diskusi dan tugas mandiri. Singkatnya setiap bentuk sambung rasa (komunikasi) dapat dimanfaatkan dalam proses pendidikan umum (Sumaatmadja, 1990: 9) Meskipun secara umum model-model pembelajaran untuk mengembangkan sikap toleransi sebagai bagian dari pendidikan umum demikian banyak dan luwes namun terdapat beberapa model yang secara lebih spesifik ditawarkan khususnya untuk bidang pendidikan moral termasuk di dalamnya pengembangan sikap toleransi serta kemampuan berinteraksi sosial. Model-model yang ditawarkan yang menitikberatkan pada interaksi sosial ini ialah

pada proses latihan menghayati hakekat nilai/moral melalui proses pelibatan langsung dalam proses-proses simulatif atau situasi sebenarnya (Udin Saripudin, 1989: 136).

Dari proses-proses interaksi ini para siswa diharapkan dapat memperoleh wawasan fungsi, peran dan tanggung jawab moral dan sosial yang sesungguhnya dalam masyarakat dan dapat memperkuat pengertiannya tentang konsep dan prinsip nilai dan moral. Beberapa model tersebut adalah:

a. Model Investigasi Kelompok (Group Investigation)

Model ini bertolak dari pandangan John Dewey (1917), Herbert Tellen (1960) dalam Joyce dan Weil (1986) yang memberikan pernyataan dengan tegas bahwa “pendidikan dalam masyarakat yang demokratis seyogyanya mengajarkan proses demokrasi secara langsung”. Atas dasar ini maka model ini menawarkan agar dalam mengembangkan masalah moral dan sosial siswa diorganisasikan dengan cara melakukan penelitian bersama atau “cooperative inquiry” terhadap masalah-masalah sosial dan moral, maupun masalah akademis.

Pada dasarnya model ini dirancang untuk membimbing para siswa mendefinisikan masalah, mengeksplorasi berbagai cakrawala mengenai masalah itu, mengumpulkan data yang relevan, mengembangkan dan mengetes hipotesis. Dalam rangka itu, para guru seyogyanya mengorganisasikan proses belajar melalui kerja kelompok dan mengarahkannya, membantu para siswa menemukan informasi, dan mengelola terjadinya berbagai interaksi dan aktivitas belajar.

b. Model Bermain Peran (Role Playing)

Model ini dirancang oleh Fanie dan Heorge Shaftel (1984), khususnya untuk membantu siswa mempelajari nilai-nilai sosial dan moral dan pencerminannya dalam perilaku. Di samping itu model ini digunakan pula untuk membantu para siswa mengumpulkan dan mengorganisasikan isu-isu moral dan sosial, mengembangkan empathy terhadap orang lain, dan berupaya memperbaiki keterampilan sosial. Dalam model ini siswa dibimbing untuk memecahkan berbagai konflik belajar mengambil peran orang lain, dan mengamati perilaku sosial.

c. Model Penelitian Yurisprudensi (Jurisprudential Inquiry)

Model ini pada mulanya dirancang dan digunakan untuk para pelajar Sekolah Menengah Pertama dalam mengajarkan ilmu sosial. Pada dasarnya metode ini menerapkan metode studi kasus dalam proses peradilan dan menerapkannya dalam suasana belajar di sekolah. Dalam model ini para pelajar sengaja dilibatkan dalam masalah-masalah sosial yang menuntut pembuatan kebijakan pemerintah yang diperlukan serta berbagai pilihan untuk mengatasi isu tersebut, misalnya tentang konflik moral, nirtoleransi dan sikap sosial lainnya. Walaupun model ini semula dan terutama dirancang untuk digunakan dalam pengajaran ilmu sosial, potensial untuk digunakan dalam bidang studi yang membahas isu-isu kebijaksanaan umum

atau berkaitan dengan kebijaksanaan umum, termasuk yang berkenaan dengan isu-isu atau konflik moral dalam kehidupan sehari-hari.

d. Model Penelitian Sosial (Social Science Inquiry)

Model ini dikembangkan atas dasar kerangka konseptual yang sama dengan penelitian ilmiah yang diterapkan dalam bidang ilmu-ilmu alamiah dan model penelitian sosial dalam bidang ilmu-ilmu sosial. Walaupun model-model sosial ini dirancang secara khusus untuk memanfaatkan proses sosial, dapat juga digunakan untuk mencapai tujuan akademis, seperti latihan berfikir dan pembangunan konsep. Dasar dari model ini ialah proses kesepakatan sosial (social negotiation). Model ini menuntut para pelajar untuk menguji dirinya sendiri, perilaku kelompok, dan proses sosial dan etis yang lebih besar. Pengembangan sikap toleransi dan kebersamaan di kalangan siswa, di samping terkait dengan interaksi dirinya dengan orang lain, juga dengan sendirinya berkaitan pula dengan pengembangan pribadi. Jika dikembalikan kepada postulat pendidikan moral dari Piaget yang juga dipakai oleh Kohlberg (Duska dan Whelan 1997), maka model pembinaan pribadi akan memberi andil besar dalam membina keadaan bahwa perilaku manusia memang terikat oleh norma yang berlaku. Oleh sebab itu harus ditumbuhkan dalam diri siswa, kualitas pribadi, dalam hal ini komitmen pribadi siswa terhadap nilai-nilai moral. Esensi tujuan Pendidikan Moral Pancasila yang didukung oleh model-model yang berorientasi pada pembinaan pribadi sesungguhnya adalah “penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila”. Dalam kerangka konsep “Confluent taxonomy” (Saripudin, 1989: 139), proses penghayatan dan pengamalan ini tidak terlepas dari proses penalaran. Karena itu penerapan model-model pembinaan pribadi merupakan salah satu sarana bagi terbinanya pribadi siswa yang mencerminkan esensi nilai moral Pancasila. Beberapa model pembelajaran yang dapat dikembangkan untuk pembinaan kepribadian ini adalah;

a. Model pengajaran tanpa arahan (non Directive Teaching)

Model ini pada prinsipnya adalah meletakkan peranan guru untuk secara aktif membangun kerjasama yang diperlukan dan memberikan bantuan yang dibutuhkan pada saat para pelajar mencoba memecahkan masalah. Model ini digunakan dalam berbagai cara, terutama sebagai model dasar untuk melaksanakan pendidikan secara lkeseluruhan. Kedua, model ini digunakan dengan cara mengkombinasikannya dengan model lain untuk menjamin bahwa hubungan itu dibuat sendiri oleh para siswa. Ketiga, model ini digunakan pada saat siswa merencanakan kegiatan mandiri atau kelompok. Keempat, model ini dipakai secara periodik pada saat memberikan penyuluhan kepada para siswa, menemukan apa yang sedang mereka pikirkan dan rasakan, dan membantu mereka memahami apa yang mereka lakukan. Seperti halnya model lain, model ini telah dipergunakan dalam berbagai situasi dan berbagai mata pelajaran, dan secara khusus dirancang untuk mengembangkan “selfunderstanding” dan “independence”, karena itu dapat dipakai secara efektif untuk mencapai tujuan yang bersifat sosial dan moral.

b. Model Sinektis (Synectics Models)

Pada mulanya model ini dikembangkan untuk dipakai dalam kelompok kreatif atau "creative group". Model ini dirancang untuk membantu individu membuka pintu pemecahan masalah, kegiatan tulis menulis dan memperoleh pandangan baru dalam berbagai topik. Di kelas model ini diperkenalkan kepada para siswa dalam rangkaian bengkel kerja sampai kepada saat di mana mereka dapat menerapkan prosedur secara individual dalam kelompok yang sedang bekerjasama. Walaupun model ini dirancang untuk memberikan ransangan kreativitas, model ini telah memberikan dampak pengiring berupa dorongan bagi tumbuhnya kerjasama, belajar keterampilan, dan rasa hangat dalam hubungan antar siswa serta memperkuat nilai sosial.

c. Model Latihan Kesadaran (Awareness Training)

Seperti dikemukakan oleh Saripudin (1989) bahwa menurut beberapa pakar antara lain (Brown, 1964; Perl, 1968; Schiltz, 1958 dan 1967), tujuan model ini adalah memperluas kesadaran diri dan kemampuan untuk merasa dan berpikir adalah tujuan utama dari model ini. Model ini berisikan rangkaian kegiatan lokakarya atau workshop yang dapat mendorong timbulnya refleksi hubungan antar individu, citra diri atau "self image", eksperimentasi dan penampilan diri.

d. Model pertemuan kelas (Classroom meeting) William Glaser (1965)

mengadaptasi model konseling untuk merancang model ini dengan maksud membantu para pelajar memikul tanggung jawab atas perilakunya dan tanggung jawab untuk lingkungan sosialnya sehingga dapat digunakan dalam lingkungan kelas. Di dalam kelas model ini diwujudkan dalam bentuk rapat atau pertemuan di mana kelompok bertanggung jawab untuk membangun sistem sosial yang sesuai untuk melaksanakan tugas-tugas akademis dengan mempertimbangkan unsur perbedaan perseorangan dengan tetap menghargai tugas-tugas bersama dan hak-hak orang lain. Beberapa model yang dikemukakan di atas dapat dijadikan sebagai alternatif dalam kegiatan pembelajaran, baik mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila maupun mata pelajaran lain terutama yang memiliki muatan lebih besar tentang pengembangan nilai dan moral, seperti pelajaran Pendidikan Agama, mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial.

Bahwa dalam semua nilai dan situasi pendidikan tutnutan akan kebebasan yang secara potensial bisa menentukan pribadi-pribadi yang otonom dan sadar diri harus memperoleh perhatian istimewa (Keller & Reuss, 1985). Dalam prase yang lebih praktis bahwa apapun yang kita kerjakan dalam pendidikan moral anak harus belajar mengembangkan cara pandang personalnya, dan pada saat yang sama mempertimbangkan pula cara pandang orang lain.

5. Kesimpulan

Pengembangan sikap toleransi dan kebersamaan di kalangan siswa menuju pada pembentukan kepribadian yang utuh, merupakan suatu dimensi penting dalam proses pendidikan. Dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah pengembangan aspek-aspek ini seringkali tidak menjadi bagian yang utuh dalam proses pembelajaran. Sebagian besar guru lebih merasa bahwa misi pembelajarannya hanya mengembangkan aspek-aspek intelektual, dan sebagian lagi merasa hanya mempunyai tanggung jawab dalam pengembangan aspek-aspek ketrampilan siswa. Padahal sesungguhnya dalam semua mata pelajaran terkandung kewajiban untuk mengembangkan aspek-nilai dan sikap. Memang diakui bahwa ada beberapa mata pelajaran yang muatan pengembangan aspek nilai memiliki bobot lebih besar dari mata pelajaran-mata pelajaran lainnya.

Khusus dalam beberapa mata pelajaran yang lebih sarat dengan pendidikan nilai, maka upaya pengembangan sikap toleransi dan kebersamaan di kalangan siswa harus dapat dikembangkan melalui model-model pembelajaran yang lebih banyak menempatkan siswa sebagai partisipan yang aktif, baik dalam mengamati fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat maupun dalam melakukan suatu simulasi di kelas. Bentuk-bentuk pembelajaran yang melibatkan siswa secara langsung seperti ini oleh para ahli serta hasil-hasil penelitian dari berbagai pihak diyakini lebih mampu menumbuhkan kepekaan mereka terhadap nilai-nilai yang ingin dikembangkan antara lain sikap toleransi dan kebersamaan. Dalam pengembangan sikap toleransi dan kebersamaan di kalangan siswa, maka rekayasa pedagogis guru dalam proses pembelajaran menjadi sangat penting, karena guru memiliki kewenangan yang sangat besar dalam menentukan bentuk-bentuk pembelajaran yang diinginkan. Untuk itu guru dapat memilih model-model pembelajaran yang disarankan untuk pengembangan sikap siswa, sehingga siswa benar-benar memperoleh kesempatan yang luas dan nyata dalam kegiatan belajarnya.

6. Daftar Pustaka

Soemanto, R. B. (2018). Menghidupi Toleransi, Membangun Kebersamaan. *Dialektika Masyarakat: Jurnal Sosiologi*, 2(1), 47-58.

Sari, Y. M. (2014). Pembinaan toleransi dan peduli sosial dalam upaya memantapkan watak kewarganegaraan (civic disposition) siswa. *Jurnal pendidikan ilmu sosial*, 23(1).

Purwaningsih, E. (2015). Mengembangkan sikap toleransi dan kebersamaan di kalangan siswa. *Jurnal Visi Ilmu Pendidikan*, 7(2).